



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## DUGAAN KETERLIBATAN AUDITOR BPK DALAM KASUS KORUPSI DI DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

**Rachmi Suprihartanti Septiningtyas**  
Analisis Legislatif Ahli Madya  
[rachmi.suprihartanti@dpr.go.id](mailto:rachmi.suprihartanti@dpr.go.id)

**Desty Bulandari**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[desty.bulandari@dpr.go.id](mailto:desty.bulandari@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Pada 15 November 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan seorang auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai tersangka dalam dugaan korupsi yang terjadi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan. Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada 11 April 2023, di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Jawa Tengah atau BTP Kelas I Semarang.

Berdasarkan pengembangan penyidikan, KPK menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan karena dugaan menerima suap dari proyek pembangunan dan perbaikan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022 pada proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, empat proyek konstruksi jalur kereta api dan dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender. Dari kesepuluh tersangka, enam orang pejabat DJKA diduga menerima suap berupa *fee* sebesar 5 hingga 10 persen dari nilai proyek, yang totalnya diperkirakan mencapai lebih dari Rp14,5 miliar. Sementara itu, para pemberi suap yang terdiri dari beberapa perusahaan swasta seperti PT Istana Putra Agung, PT Dwifarita Fajarkharisma, dan PT KA Manajemen Properti juga tidak luput dari jeratan hukum. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlibat mengatur rekanan tertentu untuk menjadi pemenang lelang. Sebelum proses lelang, para calon pemenang dikumpulkan oleh PPK, baik di kantor PPK maupun di tempat lain seperti hotel, dimana PPK memberikan arahan mengenai metode pekerjaan, alat, dan dukungan lainnya dalam proyek.

Dalam perkembangan kasus ini, diduga terdapat keterlibatan auditor BPK. Auditor yang seharusnya bertugas memeriksa dan memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan aturan, justru diduga memanipulasi hasil audit dengan menghapus atau mengurangi temuan dalam kasus tersebut. Sangat disayangkan bahwa auditor, yang seharusnya bertugas untuk memeriksa dan menetapkan kerugian keuangan negara, malah terlibat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menyebabkan kemampuan untuk mendeteksi dini soal indikasi tindak pidana korupsi melalui audit laporan keuangan di suatu lembaga menjadi lemah.

## Atensi DPR

Kasus dugaan korupsi di DJKA, Kementerian Perhubungan, menunjukkan kompleksitas dalam pengawasan proyek strategis nasional yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi patut terus didukung oleh semua pihak, termasuk DPR RI, terlebih ketika kasus diduga telah melibatkan auditor sebagai pelaku korupsi dalam kegiatan audit. Melalui fungsi pengawasannya, Komisi III DPR RI dalam mengadakan rapat kerja dengan lembaga yang bertugas dalam bidang penegakan hukum kasus korupsi, khususnya KPK, perlu terus mengingatkan untuk merealisasikan kebijakan dan langkah strategis dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Langkah tersebut diperlukan agar pemberantasan korupsi berjalan efektif dan mampu membantu upaya optimalisasi pendapatan atau penerimaan negara.

## Sumber

antaranews.com, 16 November 2024;  
lawjustice.com, 24 November 2024;  
*Media Indonesia*, 18 November 2024  
nasional.kompas.com, 17 November 2024;  
*Rakyat Merdeka*, 17 November 2024;  
tvonenews.com, 17 November 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

## Polhukam

Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman  
Rachmi Suprihartanti S.

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Suhartono  
Venti Eka Satya  
Dewi Wuryandani  
Eka Budiyantri

## Kesra

Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.  
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

